

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menurut Badan Pusat Statistik (2015) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia.

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Menurut Sukmaraga (2011) strategi dan instrumen pemerintah dalam penetapan sasaran pertumbuhan secara efektif pada setiap daerah salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, seperti : (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (5) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan (6) Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah otomomi daerah ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, maupun alam pada setiap daerah, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pada setiap daerah, Sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.

Dalam PP No. 42/1981, dimana orang, keluarga atau penduduk yang samasekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi orang atau keluarga dianggap miskin. Menurut Badan Pusat Statistik patokan ukuran untuk penduduk miskin itu ada tiga golongan yaitu lapisan miskin yang mempunyai pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak lebih dari 360 kg tetapi kurang

dari 480 kg, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak 240-360 kg dan lapisan paling miskin yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak kurang dari 240 kg.

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi dan kekurangan kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Berikut adalah gambaran umum penduduk miskin menurut Provinsi di Indonesia tahun 2014 adalah:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin PerProvinsi Di Indonesia Tahun 2014

PROVINSI	2014		
	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa)		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
ACEH	155.81	703.6	859.41
SUMATERA UTARA	727.76	780.38	1508.14
SUMATERA BARAT	118.48	231.05	349.53
RIAU	174.79	388.13	562.92
JAMBI	125.6	185.97	311.56
SUMATERA SELATAN	360.73	751.8	1112.53
BENGKULU	106	216.83	322.83
LAMPUNG	197.94	902.74	1100.68
KEP. BANGKA BELITUNG	18.83	47.79	66.62
KEP. RIAU	83.09	31.75	114.83
DKI JAKARTA	368.67	0	368.67
JAWA BARAT	2706.52	1779.13	4485.65
JAWA TENGAH	1789.57	2716.21	4505.78
DI YOGYAKARTA	292.64	192.91	485.56
JAWA TIMUR	1571.15	3204.82	4775.97
BANTEN	418.95	271.71	690.67
BALI	115.8	102.99	218.79
NUSA TENGGARA BARAT	377.28	425.01	802.29
NUSA TENGGARA TIMUR	97.06	1063.47	1160.53
KALIMANTAN BARAT	88.15	317.36	405.51
KALIMANTAN TENGAH	48.72	99.41	148.13
KALIMANTAN SELATAN	72.48	116.68	189.16
KALIMANTAN TIMUR	80.82	129.16	209.99
KALIMANTAN UTARA	13.32	27.61	40.93
SULAWESI UTARA	58	159.14	217.15
SULAWESI TENGAH	79.25	327.09	406.34
SULAWESI SELATAN	157.18	707.34	864.51
SULAWESI TENGGARA	56.77	288.25	345.02
GORONTALO	27.01	179.51	206.51
SULAWESI BARAT	22.51	130.69	153.21
MALUKU	51.6	276.17	327.78
MALUKU UTARA	8.29	64.35	72.65
PAPUA BARAT	18.82	206.72	225.54
PAPUA	30.28	867.93	898.21
INDONESIA	10619.86	17893.71	28513.57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

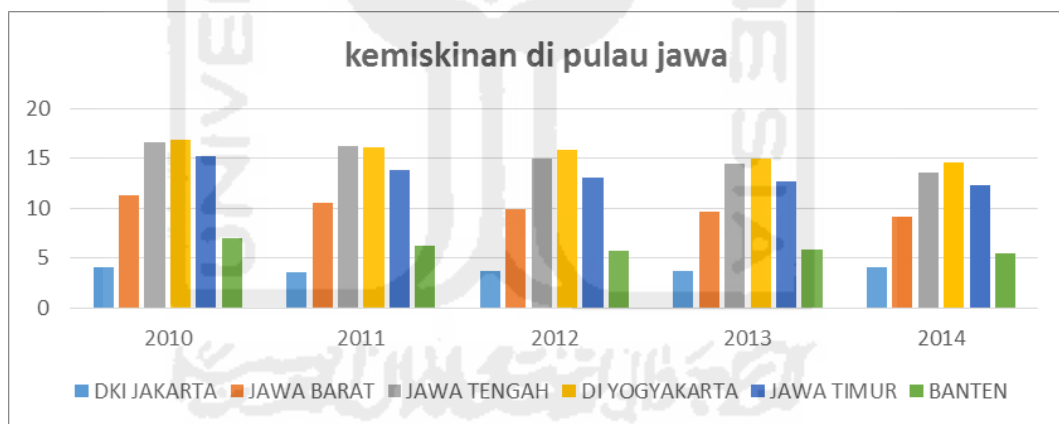
Untuk Negara berkembang seperti Indonesia memang angka kemiskinan selalu menjadi masalah utama pemerintah. Sampai saat ini masalah kemiskinan sedang di upayakan pemerintah dengan berbagai cara, salah satu cara adalah

otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan suatu daerah dengan berbagai sumberdaya yang dimiliki agar mengurangi ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut.

Melihat tabel 1.1 bahwasanya angka kemiskinan Indonesia 10619.86 ribu jiwa di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan angka kemiskinan sebesar 17893.71 ribu jiwa yang dimana jumlah terbesar berada pada daerah pedesaan sehingga total penduduk miskin di Indonesia adalah 11,3%. Provinsi yang berada di pulau jawa memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di bandingkan dengan Provinsi yang berada di Pulau Sumatra maupun Pulau Kalimantan

Presentase Penduduk Miskin Antar Provinsi Di Pulau Jawa

Tahun 2010-2014



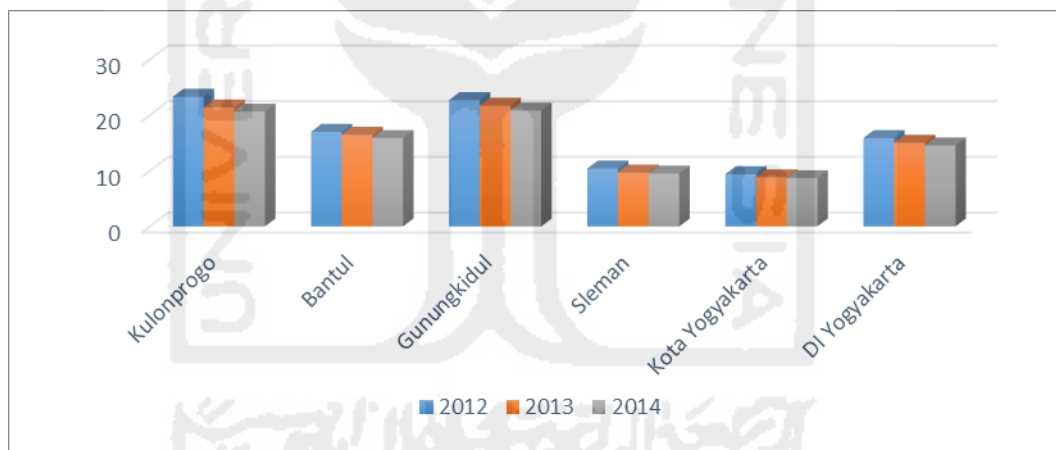
Gambar 1.1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa presentase kemiskinan berfluktuasi dari tahun 2010-2014. Pengaruh kemiskinan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi di Pulau Jawa. Jika melihat tabel di atas bahwa dari tahun 2010 Provinsi DI Yogyakarta memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa

dengan presentase angka kemiskinan sebesar 16,83% memiliki penduduk miskin yang paling tinggi dari pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Dengan rentang waktu selama 5 tahun Provinsi DI Yogyakarta selalu berada pada angka kemiskinan tertinggi, akan tetapi pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mampu mengatasi kemiskinan sehingga setiap tahunnya angka kemiskinan selalu menurun dan pada tahun 2014 menjadi 14,55%, akan tetapi dengan presentase 14,55% masih membawa Provinsi DI Yogyakarta berada pada posisi tertinggi dengan penduduk miskin di Pulau Jawa.

Presentase kemiskinan Antar Kabupaten Di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2012-2014



Gambar 1.2

Sumber: Badan pusat Statistik, 2015

Melihat gambar 1.2 menunjukkan angka kemiskinan yang terjadi di kabupaten Provinsi DI Yogyakarta. Kemiskinan tertinggi berada pada wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan Presentase sebesar 22,7% di tahun 2012. Daerah Gunungkidul merupakan daerah yang tandus dan dataran tinggi dengan keadaan

tanah tidak subur karena tanah mengandung bebatuan. Maka dari itu daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki angka presentase kemiskinan yang tinggi dari pada daerah Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Hingga tahun 2014 Gunungkidul masih berada pada angka yang tertinggi dalam kemiskinan sebesar 20,83% atau 148.400 jiwa akan tetapi setiap tahunnya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul terus menurun karena terbantu oleh sektor pariwisata. Potensi Kabupaten Gunungkidul pada sektor pariwisata membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidamerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya PAD yang diterima oleh daerah tersebut. Otonomi daerah akan menimbulkan kemampuan daerah yang berbeda, khususnya kemampuan dalam hal penerimaan pendapatan. Tinggi atau rendahnya tingkat kemampuan suatu daerah tergantung pada mampu atau tidaknya suatu daerah mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi suatu daerah untuk melaksanakan proses kemandirian daerah, tanpa

didukung oleh pemerintah pusat. Data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007). Oleh karena itu, pemerintah pusat akan membantu mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemberian Dana Perimbangan ditujukan untuk mengurangi adanya kesenjangan fiskal dan membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. DAU dapat digunakan sesuai dengan kepentingan dan prioritas daerah termasuk kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam pembagian DAU mencakup variabel jumlah penduduk miskin. Bantuan dana transfer dari pemerintah pusat yang besar seharusnya dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun fasilitas bagi kepentingan publik tetapi faktanya sampai saat ini tingkat kemiskinan tiap daerah masih tergolong tinggi.

Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akanberimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Kuncoro, 2007). Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangatlah penting. Dengan peran pemerintah dalam distribusi pendapatan yang baik maka akan dapat

mengurangi kemiskinan. Distribusi pendapatan berasal dari pendapatan daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah adalah potensi daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Pemerintah pusat membantu dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam hal pendapatan agar pendapatan daerah dapat terdistribusi dengan baik dan dapat mengurangi kemiskinan pada suatu daerah.

Berdasarkan data dan uraian tersebut diatas mengenai kemiskinan. Maka penulis ingin menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan mengambil judul penelitian “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006-2014”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk miskin antar Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2006-2014?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap jumlah penduduk miskin antar Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2006-2014?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap jumlah penduduk miskin antar Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2006-2014?
4. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin antar Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2006-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk miskin antar Kabupaten Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2006-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap jumlah penduduk miskin antar Kabupaten Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2006-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap jumlah penduduk miskin antar Kabupaten Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2006-2014.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin antar Kabupaten Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2006-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat hasil penelitian bagi pihak lain diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai pertimbangan untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat hasil penelitian bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan fiskal terutama yang berkaitan dengan kemiskinan antar Kabupaten Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2006-2014.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini di lakukan dengan metode sistematika penulisan skripsi pada umumnya yakni terdiri atas lima bab pokok yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Kajian pustakan berisis tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelum menjadi acuan dalam penelitian skripsi ini, dan landasan teori berisi tentang teori-teori yang terkait dengan yang diteliti atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV Hasil dan Analisis

Dalam bab ini akan dilakukan pengujian data dan menguraikan hasil-hasil dari analisis data yang telah diperoleh serta menjelaskan mengenai hasil perhitungan statistik dari hubungan masing-masing variabel termasuk dengan pengujian hipotesisnya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat dua hal, yaitu:

- Kesimpulan

Bagian ini menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang

merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah serta melalui tahap analisis pada bagian sebelumnya.

- Saran

Bagian ini menjelaskan saran penulis untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.

